

# HASIL MONITORING

## PENGIRIMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN (LHKPN) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN PERIODE TAHUN 2025



### **PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**

**Jl. Sutan Syahrir No 16 Pangkalan Bun. 74111  
Kab. Kotawatingin Barat, Kalimantan Tengah  
Telp. ( 0532 ) 21014 , 21179 Fax. (0532) 21179**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta kekayaan Penyelenggaran Negara.

### **B. DAN TUJUAN KEGIATAN**

Adapun tujuan dari pelaporan Harta Kekayaan adalah sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

### **C. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Pelaporan LHKPN dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026.

## **BAB II HASIL KEGIATAN**

### **A. WAJIB LHKPN**

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019 maka yang menjadi Wajib LHKPN pada Pengadilan Tingkat I adalah sebagai berikut:

1. Hakim
2. Hakim Ad-hoc
3. Panitera
4. Panitera Muda
5. Panitera Pengganti
6. Kuasa Pengguna Anggaran
7. Pejabat Pembuat Komitmen

Sesuai dengan hal tersebut di atas yang menjadi Wajib LHKPN pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah:

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Hakim	12	Termasuk KPN dan WKPN
2	Panitera	1	
3	Panitera Muda	3	
4	Panitera Pengganti	2	

5	Kuasa Pengguna Anggaran	1	
6	Pejabat Pembuat Komitmen	1	
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	

**B. HASIL KEGIATAN**

Pada bulan Januari 2026 Pelaksanaan pengisian LHKPN pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah rampung dilaporkan oleh wajib LHKPN sebanyak 20 (Dua puluh) orang (100%) sebagaimana yang terdapat pada tabel Hasil Monitoring Penyampaian LHKPN Periode Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.


**C. KENDALA**

Dalam pelaksanaan pelaporan ini tidak terdapat kendala berarti yang dihadapi karena pada dasarnya setiap wajib LHKPN pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sudah mengetahui alur dan tata cara pengisian LHKPN.

**BAB III  
PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil monitoring bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menyelesaikan pengisian dan pelaporan LHKPN sebesar 100% (20 orang wajib LHKPN) pada bulan 20 Januari 2025 atau dengan kata lain jauh sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pangkalan Bun, 22 Januari 2026  
**KETUA PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN,**  
  
**IKHATINA, S.H.M.Hum.**

**HASIL MONITORING PENYAMPAIAN LHKPN TAHUN 2025  
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

No	Nama	NIP	Jabatan	Status Pelaporan	Tanggal Kirim
1	Ikha Tina, S.H.,M.Hum	197701272001122002	Ketua	Laporan telah dikirim	12 Januari 2026
2	Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.	197604092002121004	Wakil	Laporan telah dikirim	7 Januari 2026
3	Edi Rahmad, S.H., M.Kn.	199006252017121005	Hakim	Laporan telah dikirim	7 Januari 2026
4	Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.	199406102017121003	Hakim	Laporan telah dikirim	20 Januari 2026
5	Febdhy Setyana, S.H., M.H.	198602232017121001	Hakim	Laporan telah dikirim	1 Januari 2026
6	Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.	199403012017121003	Hakim	Laporan telah dikirim	7 Januari 2026
7	Mufti Muhammad, S.H.	198909262017121002	Hakim	Pengumuman	19 Januari 2026
8	Pungky Wibowo, S.H., M.H	199310142017121002	Hakim	Laporan telah dikirim	19 Januari 2026
9	Erwin Tri Surya Anandar, S.H.	199002202017121006	Hakim	Laporan telah dikirim	19 Januari 2026
10	Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.	199402102017122002	Hakim	Laporan telah dikirim	15 Januari 2026
11	Imam Setyawan, S.H.	199506012017121002	Hakim	Laporan telah dikirim	15 Januari 2026
12	Muhammad Cakranegara, S.H.	199507172017121002	Hakim	Laporan telah dikirim	15 Januari 2026
13	Harly Marlyn Simanjuntak, S.H	197610012001121002	Panitera	Laporan telah dikirim	19 Januari 2026
14	Husni Thamrin, S.T.	197803082009041003	KPA	Laporan telah dikirim	19 Januari 2026
15	Hendy Pradipta, S.H.	198310062009121008	Panitera Muda Hukum	Laporan telah dikirim	19 Januari 2026
16	Wahyudi, S.H.	197107101993031006	Panitera Muda Perdata	Laporan telah dikirim	19 Januari 2026
17	Hariyanto	197501151994031002	Panitera Muda Pidana	Laporan telah dikirim	20 Januari 2026
18	Maya Agustina, S.H.	198408222014082001	Panitera Pengganti	Laporan telah dikirim	19 Januari 2026
19	Bayu Sistiawan, A.,Md.S.H.	198309232011011004	Panitera Pengganti	Laporan telah dikirim	19 Januari 2026
20	Chanro Simamora, S.H.	198904042012121002	PPK	Laporan telah dikirim	7 Januari 2026

Pangkalan Bun, 22 Januari 2026

**Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,**



**IKHA TINA, S.H.M.Hum.**



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : IKHA TINA  
NIK : 1601146701770002  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
Jabatan : KETUA  
Jenis Laporan : Periodik - 2025  
Tanggal Kirim : 12 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : BAYU SISTIAWAN  
NIK : 6202052309830002  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
Jabatan : PANITERA PENGGANTI  
Jenis Laporan : Periodik - 2025  
Tanggal Kirim : 19 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : MUHAMMAD CAKRANEGARA  
NIK : 3573031707950011  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
Jabatan : HAKIM  
Jenis Laporan : Periodik - 2025  
Tanggal Kirim : 15 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Yth. Sdr **CHANRO SIMAMORA**

MAHKAMAH AGUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

<b>Atas Nama</b>	: CHANRO SIMAMORA
<b>Jabatan</b>	: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN - PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN - PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
<b>Bidang</b>	: YUDIKATIF
<b>Lembaga</b>	: MAHKAMAH AGUNG
<b>Tanggal / Tahun Pelaporan</b>	: 2025

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

-----  
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) | [elhkpn.kpk.go.id](mailto:elhkpn.kpk.go.id) | Layanan LHKPN **198**



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : EDI RAHMAD  
NIK : 3402152506900004  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
Jabatan : HAKIM  
Jenis Laporan : Periodik - 2025  
Tanggal Kirim : 7 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ERWIN TRI SURYA ANANDAR  
NIK : 3672072002900001  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
Jabatan : HAKIM  
Jenis Laporan : Periodik - 2025  
Tanggal Kirim : 19 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : HENDY PRADIPTA  
NIK : 6271013004870003  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
Jabatan : PANITERA MUDA HUKUM  
Jenis Laporan : Periodik - 2025  
Tanggal Kirim : 19 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : DWI FAJRIAH SUCI ANGGRAINI  
NIK : 3302165002940003  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
Jabatan : HAKIM  
Jenis Laporan : Periodik - 2025  
Tanggal Kirim : 15 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : FEBDHY SETYANA  
NIK : 6301032302860005  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
Jabatan : HAKIM  
Jenis Laporan : Periodik - 2025  
Tanggal Kirim : 1 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Yth. Sdr **HARLY MARLYN SIMANJUNTAK**

MAHKAMAH AGUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

<b>Atas Nama</b>	: HARLY MARLYN SIMANJUNTAK
<b>Jabatan</b>	: PANITERA - PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN - PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
<b>Bidang</b>	: YUDIKATIF
<b>Lembaga</b>	: MAHKAMAH AGUNG
<b>Tanggal / Tahun Pelaporan</b>	: 2025

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

-----  
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) | [elhkpn.kpk.go.id](mailto:elhkpn.kpk.go.id) | Layanan LHKPN **198**



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : IMAM SETYAWAN  
NIK : 3323030106950001  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
Jabatan : HAKIM  
Jenis Laporan : Periodik - 2025  
Tanggal Kirim : 15 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUFTI MUHAMMAD
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 783764

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>420.000.000</b>
1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>148.000.000</b>
1. MOBIL, NISSAN XTRAIL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 148.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>11.694.123</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>579.694.123</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>579.694.123</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : MAYA AGUSTINA, S.H.  
NIK : 6201026208840004  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
Jabatan : PANITERA PENGGANTI  
Jenis Laporan : Periodik - 2025  
Tanggal Kirim : 19 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Yth. Sdr **PUNGKY WIBOWO**

MAHKAMAH AGUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

<b>Atas Nama</b>	: PUNGKY WIBOWO
<b>Jabatan</b>	: HAKIM - PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN - PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
<b>Bidang</b>	: YUDIKATIF
<b>Lembaga</b>	: MAHKAMAH AGUNG
<b>Tanggal / Tahun Pelaporan</b>	: 2025

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

-----  
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) | [elhkpn.kpk.go.id](mailto:elhkpn.kpk.go.id) | Layanan LHKPN **198**



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : AHKAM RONNY FARIDHOTULLAH  
NIK : 3404071006940002  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
Jabatan : HAKIM  
Jenis Laporan : Periodik - 2025  
Tanggal Kirim : 20 Januari 2026

*Catatan:*

*Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.*



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

.....  
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA  
NIK : 3308100103940004  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
Jabatan : HAKIM  
Jenis Laporan : Periodik - 2025  
Tanggal Kirim : 7 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : WAHYUDI  
NIK : 6202051007710004  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
Jabatan : PANITERA MUDA PERDATA  
Jenis Laporan : Periodik - 2025  
Tanggal Kirim : 19 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.